

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR WIJAYA MULYA SENTOSA  
TAHUN 2025**



**Jln. Prof Dr. Ir Herman Yohanes No 52 Sagan Yogyakarta  
TELEPON: (0274) 557185, 551390**

## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

### Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	<b>BPR WIJAYA MULYA SENTOSA</b>
Alamat	<b>Jl. Prof Dr. Ir Herman Yohanes No 52 Caturtunggal Depok Sleman</b>
Nomor Telepon	<b>(0274) 551390</b>

### Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Wijaya Mulya Sentosa pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang masih dipengaruhi oleh efek dari pandemi COVID-19, serta ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang memicu perlambatan likuiditas dan peningkatan risiko kredit.

BPR WIJAYA MULYA SENTOSA memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR WIJAYA MULYA SENTOSA dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Sleman DIY. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR WIJAYA MULYA SENTOSA didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR WIJAYA MULYA SENTOSA.

BPR WIJAYA MULYA SENTOSA telah beroperasi lebih dari 35 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai visi, yaitu menjadi mitra masyarakat yang handal dan terpercaya.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR WIJAYA MULYA SENTOSA selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR WIJAYA MULYA SENTOSA terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian  
Sendiri (Self Assessment) Tata  
Kelola **2. Baik**

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini

tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama **DONISIUS SANTOSO**

### Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

#### I. Tanggung Jawab

1. Tercapainya pertumbuhan penyaluran dan penghimpunan dana, kenaikan tingkat laba, tingkat kesehatan, penurunan rasio kredit bermasalah dan penanganan AYDA
2. Terjaminnya pelaksanaan pemasaran dan perkreditan BPR dengan baik, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku
3. Terlaksananya proses penyaluran dana yang pruden dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
4. Tercapainya Rencana Bisnis sesuai sasaran yang ditetapkan

#### II. Tugas

1. Menyusun strategi penyaluran dan penghimpunan dana yang efektif dan efisien
2. Melakukan verifikasi dan penilaian secara menyeluruh terhadap dokumen calon Debitur dan memastikan kelayakan calon Debitur, usaha dan jaminan
3. Melakukan analisa dan penilaian terhadap BPR sindikasi
4. Menjaga keseimbangan penghimpunan dan penyaluran kredit serta keseimbangan likuiditas yang optimal
5. Memimpin komite kredit dan memberikan keputusan terhadap proposal pengajuan kredit dengan mempertimbangkan hasil komite
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan
7. Memberikan masukan dan rekomendasi dalam penyusunan SOP Kredit, Tabungan dan Deposito sesuai dengan tingkat persaingan pasar
8. Merumuskan produk baru atau menciptakan inovasi produk sesuai yang dibutuhkan masyarakat serta meningkatkan daya saing terhadap competitor
9. Menindaklanjuti temuan audit internal, audit eksternal, OJK dan otoritas yang lain.
10. Mengupayakan portofolio kredit yang disalurkan selalu terjaga dalam kondisi sehat

2. Nama **BAMBANG WIJANARKO**

### Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

#### I. Tanggung Jawab

1. Memastikan BPR telah memiliki prosedur dan kebijakan internal sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
2. Bersama Direktur Utama bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset BPR
3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Internal, Audit Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lainnya
4. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen

- Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan
5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh PE Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko
  6. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR
  7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
  8. Terciptanya citra yang baik dan hubungan harmonis dengan lingkungan masyarakat di sekitar BPR
  9. Tersedianya laporan keuangan tepat waktu, benar, dan akurat
- II. Tugas
1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
  2. Menyusun sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
  3. Menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank terkait kegiatan usaha yang dilakukan Bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh karyawan Bank dan mengupayakan agar seluruh karyawan mempunyai kompetensi yang memadai sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain dengan menyusun pedoman manajemen sumber daya manusia
  5. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada OJK tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi:
    - a. Laporan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
    - b. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
  6. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR
  7. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang – kurangnya untuk:
    - a. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris
    - b. Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris
    - c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan OJK tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
    - d. Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai
    - e. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK antara lain komitmen dalam Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil pengawasan OJK yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT

- f. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/ atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT
- g. Menunjuk pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT
- h. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- i. Menyetujui Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada OJK

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:**

Rekomendasi Dewan Komisaris mencakup aspek-aspek berikut:

1. Penguatan tata kelola dan kepatuhan.
2. Peningkatan kualitas penyaluran kredit dan pengendalian risiko.
3. Penguatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal.
4. Peningkatan kinerja keuangan dan efisiensi operasional.
5. Peningkatan kompetensi dan disiplin sumber daya manusia.

Tindak Lanjut oleh Direksi

Berikut adalah tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris:

No Rekomendasi Dewan Komisaris Tindak Lanjut Direksi Target Waktu Penanggung Jawab Status

1 Penguatan penerapan GCG dan kepatuhan terhadap POJK/SEOJK Melakukan review dan pembaruan SOP utama serta sosialisasi kepada seluruh unit kerja Triwulan I Direktur Utama Dalam Proses

2 Peningkatan kualitas kredit dan penurunan NPL Memperketat analisa kredit, melakukan monitoring kredit bermasalah, dan membentuk rencana penyelesaian NPL Berjalan Direktur Kepatuhan Dalam Proses

3 Optimalisasi fungsi manajemen risiko Menyempurnakan risk register dan meningkatkan pelaporan risiko kepada Direksi dan Komisaris Triwulan II Direktur Kepatuhan Direncanakan

4 Peningkatan kinerja dan efisiensi operasional

Melakukan evaluasi biaya operasional dan optimalisasi pendapatan berbasis kredit produktif berjalan Direktur Utama Dalam Proses

5 Peningkatan kompetensi SDM Menyelenggarakan pelatihan internal dan eksternal sesuai kebutuhan jabatan Tahunan Direksi Berjalan

Evaluasi dan Monitoring

Direksi melakukan monitoring secara berkala atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris. Hasil pelaksanaan dan kendala yang dihadapi akan dilaporkan dalam rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

### **3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

1. Nama **IMAM DARMANTO**

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank
- c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu

strategis dan proses pekerjaan

d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.

e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.

2.

Nama

**PURWITA ARIFIN**

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank
- c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.

**Rekomendasi Kepada Direksi:**

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. memberikan arahan agar penghimpunan DPK fokus pada deposito
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2025.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

**4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:**

BPR WIJAYA MULYA SENTOSA tidak memiliki Anggota Komite

**5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

**Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:**

BPR WIJAYA MULYA SENTOSA tidak memiliki Anggota Komite

## 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	<b>DONISIUS SANTOSO</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>5,16</b>
2.	Nama	<b>BAMBANG WIJANARKO</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	<b>IMAM DARMANTO</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>7,46</b>
2.	Nama	<b>PURWITA ARIFIN</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>

Berdasarkan penelaahan data kepemilikan saham per akhir periode pelaporan, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham secara langsung dan/atau tidak langsung. Kepemilikan saham tersebut telah diungkapkan secara transparan dan tidak menimbulkan benturan kepentingan, karena tidak mempengaruhi independensi dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, serta fungsi pengurusan dan pengawasan BPR.

BPR telah memiliki dan menerapkan kebijakan pengendalian benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan POJK no 9 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS, kepemilikan saham oleh Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi prinsip transparansi, independensi, dan pengendalian benturan kepentingan :

1. Kepemilikan saham diungkapkan secara transparan  
Dicantumkan dalam Laporan GCG, RUPS, dan/atau dokumen internal.
2. Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu  
Tidak mempengaruhi kebijakan kredit, pengadaan, remunerasi, atau keputusan strategis.
3. Tidak terjadi self-dealing  
Tidak ada transaksi antara BPR dengan pihak terafiliasi yang menguntungkan pemilik saham tersebut.
4. Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif  
Melalui rapat Direksi/Dewan Komisaris sesuai tata kelola.
5. Mematuhi ketentuan conflict of interest  
Anggota yang berkepentingan tidak ikut mengambil keputusan atas transaksi yang berpotensi konflik.

## 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	<b>DONISIUS SANTOSO</b>
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	<b>BAMBANG WIJANARKO</b>
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	<b>IMAM DARMANTO</b>
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	<b>PURWITA ARIFIN</b>
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

## 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	<b>DONISIUS SANTOSO</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	PURWITA ARIFIN
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.  
 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

### 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	DONISIUS SANTOSO
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	BAMBANG WIJANARKO
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	<b>IMAM DARMANTO</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Imam Budiarto - Saudara (Kakak)
2.	Nama	<b>PURWITA ARIFIN</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	<b>IMAM BUDIARTO</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Imam Darmanto - Adik
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	1. MOHAMMAD BUCHORY KASTOMO - Anak 2. MUHAMMAD RIFKY INDRIARTO - Anak 3. ANNISA TIKA HAPSARI - Anak

Hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR : tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR : tidak ada.

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang saham pada BPR : ada

Hubungan Keluarga Pemegang saham dengan Pemegang saham lain pada BPR : ada

## 11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	<b>Rp462.000.000</b>

Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp276.000.000

#### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp74.400.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

#### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp41.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp18.000.000

#### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) **Rp0**

### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp) **Rp0**

### 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang) **2 orang**

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp) **Rp12.000.000**

### 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp) **Rp14.400.000**

Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp) **Rp7.200.000**

#### 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp) **Rp8.400.000**

Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp) **Rp7.200.000**

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS.

## 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

### 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) **2,84 : 1**

### 2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b) **1,20 : 1**

### 3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) **1,30 : 1**

### 4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) **1,38 : 1**

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) **2,54 : 1**

**13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun**

1. Tanggal Rapat **21 Januari 2025**  
Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Dewan Komisaris :

1. Evaluasi Kinerja Tahunan dan Evaluasi Realisasi RBB
2. Isu Strategis
3. Evaluasi Kebijakan Strategis
4. Pembahasan mengenai hasil Audit Intern
5. Manajemen Risiko
6. Evaluasi penyelenggaraan Teknologi Informasi
7. Pembahasan tentang APU-PPT&PPPSPM
8. Pembahasan lainnya

2. Tanggal Rapat **10 Maret 2025**  
Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Dewan Komisaris :

1. Laporan Keuangan Februari 2025
2. Realisasi dan evaluasi RBB bulan Februari 2025
3. Evaluasi Kebijakan Strategis
4. Pembahasan mengenai hasil Audit Intern
5. Evaluasi penyelenggaraan Teknologi Informasi
6. Pembahasan tentang APU-PPT&PPPSPM

3. Tanggal Rapat **26 April 2025**  
Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Dewan Komisaris :

1. Laporan Keuangan April 2025
2. Evaluasi RBB bulan April 2025
3. Evaluasi Kebijakan Strategis
4. Evaluasi penyelenggaraan Teknologi Informasi
5. Pembahasan tentang APU-PPT&PPPSPM

4. Tanggal Rapat **07 Juli 2025**  
Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Dewan Komisaris :  
1. Laporan Keuangan Juli 2025  
2. Evaluasi RBB bulan Juli 2025  
3. Evaluasi Kebijakan Strategis BPR  
4. Tindak lanjut kredit bermasalah

5. Tanggal Rapat **10 September 2025**  
Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Dewan Komisaris :  
1. Kinerja keuangan dan strategi penurunan NPL  
2. Tindak lanjut & kegiatan SDM  
3. Kebijakan strategi BPR  
4. Lain-lain (APU-PPT, Literasi keuangan dll)

6. Tanggal Rapat **01 Desember 2025**  
Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Dewan Komisaris :  
1. Penetapan RBB th 2026  
2. Target aspek Keuangan  
3. Aspek kualitas kredit dan NPL  
4. Aspek manajemen risiko  
5. Rencana pengembangan organisasi

7. Tanggal Rapat **03 Januari 2025**  
Jumlah Peserta **2 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Pengurus :  
1. Evaluasi Tahun 2024  
2. Rencana Sosialisasi RBB tahun 2025  
3. Rencana di Tahun 2025

8. Tanggal Rapat **13 Maret 2025**  
Jumlah Peserta **3 orang**

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Pengurus :  
1. Pembahasan hasil pemeriksaan OJK  
2. Evaluasi kinerja bulan Februari 2025  
3. Evaluasi kebijakan strategis  
4. Evaluasi kepatuhan  
5. Evaluasi penyelenggaraan Teknologi informasi  
6. Pembahasan APU PPT&PPSPM

	7. Tindak lanjut kredit bermasalah	
9.	Tanggal Rapat	26 Mei 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>	
	Agenda rapat Pengurus :	
	1. Evaluasi Kinerja bulan April 2025	
	2. Evaluasi kebijakan strategis	
	3. Evaluasi penyelenggaraan Teknologi Informasi	
	4. Pembahasan APU PPT&PPPSPM	
	5. Tindak lanjut kredit bermasalah	
10.	Tanggal Rapat	01 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>	
	Agenda rapat Direksi :	
	1. Penghimpunan dana	
	2. Penanganan NPL	
	3. Kepegawaian (SDM)	
	4. Perkembangan kantor	
11.	Tanggal Rapat	13 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>	
	Agenda rapat Direksi :	
	1. Perayaan HUT RI	
	2. Kehadiran Rakernas Perbarindo	
	3. Kredit	
	4. SDM	
	5. Rencana Gathering karyawan	
12.	Tanggal Rapat	01 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>	
	Agenda rapat Direksi :	
	1. Evaluasi noratis rekanan	
	2. Pembahasan perumusan Jobdesk dan KPI	
	3. Pembahasan target RBB	
	4. Pengadaan seragam pelatihan dan gathering	
13.	Tanggal Rapat	03 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Direksi :

1. Evaluasi kinerja September 2025
2. Penawaran Kerjasama Sindikasi dari BPR SUM
3. Pengadaan tambahan inventaris dan sarana operasional
4. Pelatihan SDM
5. Rencana penyusunan RBB

14.	Tanggal Rapat	07 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Direksi :

1. Pemantauan penetapan kebijakan dan prosedur tertulis
2. Penentuan jasa konsultan KPI karyawan
3. Review PKPB baru
4. Pembahasan persiapan karyawan pensiun dan habis masa kontrak
5. Pembahasan NPL

15.	Tanggal Rapat	17 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Direksi :

1. Penetapan pemberian pesangon karyawan mengundurkan diri
2. Perubahan Struktur Organisasi dan rekrutmen karyawan baru
3. Pemberian THR Natal 2025
4. Pembahasan acara pelepasan karyawan purna dan silaturahmi Natal

16.	Tanggal Rapat	18 Desember 2025
	Jumlah Peserta	4 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Pengurus :

1. Perubahan Struktur Organisasi Tahun 2026
2. Penempatan SDM sesuai Struktur Organisasi Tahun 2026
3. Pembentukan KPI Perusahaan dan Individu dan Job Description Tahun 2026
4. Pemberian THR Natal Tahun 2025
5. Penetapan Pesangon Karyawan yang Pensiun Dini
6. Penyelenggaraan Acara Natal Tahun 2025 dan Pelepasan Karyawan Purna Bakti
7. Penentuan Hasil KAP dan Rencana RUPS Tahunan 2026
8. Lainnya

17.	Tanggal Rapat	31 Desember 2025
	Jumlah Peserta	4 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

Agenda rapat Pengurus :

1. Penetapan Biaya Pembelian Pakaian Seragam Kerja
2. Penetapan Biaya Gathering Karyawan dan Pengurus

Rapat tahun 2025 :

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 6 (enam) kali dalam setahun
2. Pengurus telah melaksanakan rapat 4 (empat) kali dalam setahun
3. Direksi telah melaksanakan rapat 7 (tujuh) kali dalam setahun

#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

##### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>IMAM DARMANTO</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>6 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>PURWITA ARIFIN</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>6 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>

Rapat Dewan Komisaris tahun 2025 diadakan sebanyak 6 (enam) kali dan dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris

#### 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

##### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	<b>0 kasus</b>

### Pada Tahun Sebelumnya

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses  
Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun  
Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada  
Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada  
Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya  
Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya  
Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses  
Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Jumlah penyimpangan intern di BPR NIHIL

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang  
Telah Selesai (telah mempunyai  
kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang  
Telah Selesai (telah mempunyai  
kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

### 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang  
Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang **0 kasus**  
Dalam Proses Penyelesaian

Selama semester II tahun 2025 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi BPR

### 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

BPR telah mempunyai kebijakan tentang pengaturan benturan kepentingan. Selama tahun 2025 di BPR ada benturan kepentingan (conflict of interest) dalam transaksi sewa gedung antara Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Pemegang Saham Pengendali (PSP), namun telah ada penanganan berupa melakukan penilaian harga sewa dengan menggunakan perbandingan harga pasar yang wajar dan BPR wajib mengungkapkan dalam Laporan Tata Kelola.

### 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

#### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	04 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Gereja HKTY Pugeran
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Lustrum 1
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	13 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Sagan
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Ramadhan Sagan
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	18 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Gereja Salib Suci Sempu
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan Paskah
	Jumlah (Rp)	Rp500.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	15 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masjid Sagan
	Penjelasan Kegiatan	Kurban hari Raya Idul Adha

	Jumlah (Rp)	Rp3.700.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	05 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Perbarindo DIY
	Penjelasan Kegiatan	Donasi bencana alam Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	09 Desember 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Gereja Salib Suci Gunung Sempu
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi donasi Natal
	Jumlah (Rp)	Rp850.000

BPR memberikan dana untuk kegiatan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara wajar, transparan, dan tidak mengandung benturan kepentingan serta telah memperoleh persetujuan Direksi

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR Wijaya Mulya Sentosa untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sleman, 15 April 2026

PT. BPR Wijaya Mulya Sentosa

Disetujui oleh



Donisius Santoso, SE  
Direktur Utama



Imam Darmanto, SE  
Komisaris Utama